

P2K2 SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN KPM PKH MENUJU GRADUASI MANDIRI: TEMUAN STUDI KUALITATIF

Kevin Ibrahim Hasan^{1*}, Moh. Amin Tohari²

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 2026

Revised January 2026

Accepted January 2026

Available online January 2026

Email:

Kevinibrahimhasan14@gmail.com,

amin.tohari@umj.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan komponen strategis dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang diarahkan untuk mendorong pemberdayaan dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuju graduasi mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran P2K2 sebagai instrumen pemberdayaan KPM PKH dalam mencapai graduasi mandiri di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap KPM PKH, pendamping PKH, serta pihak kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2K2 berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, mengubah pola pikir, serta memperkuat keterampilan pengelolaan keuangan dan ekonomi keluarga KPM. Proses pemberdayaan melalui P2K2 berjalan melalui tahapan perubahan sikap, peningkatan kapasitas, dan penguatan kemandirian ekonomi. Faktor pendukung pencapaian graduasi mandiri meliputi motivasi internal KPM, kesadaran ekonomi, dan intensitas pendampingan. Sementara itu, faktor penghambat mencakup ketergantungan terhadap bantuan sosial, rendahnya manajemen keuangan, dan keterbatasan keterampilan usaha. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan P2K2 secara berkelanjutan dan partisipatif menjadi kunci dalam mendorong KPM PKH mencapai graduasi mandiri.

Kata kunci: P2K2, Pemberdayaan, PKH, KPM, Graduasi Mandiri

Abstract

The Family Ability Improvement Meeting (P2K2) is a strategic component in the Family Hope Program (PKH) which is directed to encourage the empowerment and independence of Beneficiary Families (KPM) towards independent graduation. This study aims to analyze the role of P2K2 as an instrument for empowering KPM PKH in achieving independent graduation in Duri Kepa Village, Kebon Jeruk District, West Jakarta. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observations, and documentation studies of KPM PKH, PKH companions, and village parties. The results of the study show that P2K2 plays an important role in increasing knowledge, changing mindsets, and strengthening KPM family's financial and economic management skills. The empowerment process through P2K2 runs through the stages of attitude change, capacity building, and strengthening economic independence. Supporting factors for achieving independent graduation include KPM's internal motivation, economic awareness, and mentoring intensity. Meanwhile, inhibiting factors include dependence on social assistance, low financial management, and limited business skills. This study emphasizes that optimizing the implementation of P2K2 in a sustainable and participatory manner is the key in encouraging KPM PKH to achieve independent graduation.

Keywords: P2K2, Empowerment, PKH, KPM, Independent Graduation

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi Indonesia, terutama pada kelompok rumah tangga rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber penghidupan yang berkelanjutan BPS (2023) Chambers (2006). Dalam merespons persoalan tersebut, pemerintah mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas keluarga miskin agar mampu mencapai kemandirian sosial ekonomi (Kementerian

Sosial RI, 2021). Tujuan jangka panjang PKH adalah terwujudnya graduasi, khususnya graduasi mandiri, sebagai indikator keberhasilan program dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi (Kementerian Sosial RI, 2021; Suharto, 2013).

Salah satu instrumen utama dalam strategi pemberdayaan PKH adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang dirancang sebagai ruang pembelajaran partisipatif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). P2K2 berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran KPM dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengasuhan, serta pengelolaan keuangan dan ekonomi keluarga Kementerian Sosial RI, (2021). Secara konseptual, P2K2 diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan kognitif dan sikap, tetapi juga mendorong transformasi perilaku ekonomi yang berujung pada kemandirian dan keberanian KPM untuk keluar dari ketergantungan bantuan sosial (Ife & Tesoriero, 2008; Mardikanto, 2014).

Namun demikian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi P2K2 belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian graduasi mandiri. Di banyak wilayah, P2K2 lebih dominan menghasilkan perubahan sosial dan peningkatan pengetahuan, sementara dampak terhadap penguatan ekonomi keluarga masih relatif terbatas Suharto, (2013) dalam Sulastri & Wibowo, (2020). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif program dan realitas capaian di tingkat lokal, sehingga penting untuk mengkaji bagaimana P2K2 dijalankan dalam konteks spesifik wilayah serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, merupakan salah satu wilayah dengan jumlah KPM PKH yang cukup besar, yaitu sebanyak 541 keluarga. Namun, dari jumlah tersebut hanya dua KPM yang tercatat berhasil mencapai graduasi mandiri (Data PKH Kelurahan Duri Kepa, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam proses pemberdayaan KPM, sekaligus membuka ruang analisis mengenai bagaimana P2K2 diimplementasikan, dimaknai, dan dijalankan oleh KPM serta pendamping PKH dalam konteks sosial ekonomi perkotaan yang kompleks (Chambers, 2006; Ife & Tesoriero, 2008).

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji P2K2 sebagai instrumen pemberdayaan KPM PKH menuju graduasi mandiri melalui pendekatan kualitatif. Fokus kajian diarahkan pada proses pelaksanaan P2K2, dinamika pemberdayaan yang terjadi, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan KPM dalam mencapai kemandirian. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi penguatan desain pemberdayaan PKH, khususnya dalam mengoptimalkan peran P2K2 sebagai sarana transformasi sosial dan ekonomi KPM menuju graduasi mandiri.

2. KAJIAN TEORITIS

1. P2K2 dalam Kerangka Pemberdayaan Keluarga

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan instrumen utama pendampingan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang diarahkan pada perubahan kapasitas dan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM). P2K2 tidak hanya berfungsi sebagai forum sosialisasi kebijakan, tetapi sebagai ruang pembelajaran sosial yang mendorong peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan keluarga (Kementerian Sosial RI, 2021).

Dalam konteks penelitian kualitatif, P2K2 dipahami sebagai arena interaksi sosial tempat nilai kemandirian, tanggung jawab ekonomi, dan refleksi atas ketergantungan bantuan dibentuk

dan dinegosiasikan. Oleh karena itu, P2K2 menjadi titik masuk utama untuk membaca bagaimana proses pemberdayaan dialami, dimaknai, dan dijalankan oleh KPM menuju graduasi mandiri (Ife & Tesoriero, 2008; Suharto, 2013).

2. Teori Pemberdayaan sebagai Kerangka Analisis Proses P2K2

Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses perubahan dari kondisi tidak berdaya menuju kemampuan individu dan kelompok untuk mengontrol kehidupan serta sumber daya secara mandiri. Pemberdayaan menekankan perubahan posisi sosial penerima manfaat, dari objek program menjadi subjek aktif dalam pembangunan sosial (Chambers, 1997; Mardikanto, 2014).

Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan digunakan untuk menganalisis bagaimana P2K2 bekerja sebagai proses, bukan sekadar sebagai kegiatan program. Kerangka input-proses-output digunakan sebagai alat analisis terhadap data lapangan (Suharto, 2013).

Aspek input mencakup keberadaan pendamping PKH, materi P2K2, serta kondisi awal KPM. Aspek proses meliputi dinamika interaksi dalam P2K2, perubahan pola pikir, peningkatan pengetahuan ekonomi keluarga, dan penguatan keterampilan pengelolaan keuangan. Aspek output tercermin dalam perubahan perilaku ekonomi KPM, meningkatnya kesadaran kemandirian, serta kesiapan untuk melakukan graduasi mandiri (Mardikanto, 2014).

3. Peran Pendamping PKH dalam Proses Pemberdayaan

Dalam perspektif pemberdayaan, pendamping PKH diposisikan sebagai fasilitator perubahan sosial. Pendamping tidak berperan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai aktor yang membuka ruang refleksi, memperkuat kapasitas, dan mendorong kemandirian KPM (Ife & Tesoriero, 2008).

Peran pendamping dalam P2K2 menjadi kunci penting dalam keberhasilan proses pemberdayaan, karena pendamping berfungsi sebagai mediator antara kebijakan program dan realitas kehidupan KPM (Kementerian Sosial RI, 2021). Dalam konteks penelitian ini, teori pemberdayaan digunakan untuk membaca bagaimana intensitas pendampingan, pendekatan komunikasi, serta kedekatan emosional pendamping memengaruhi motivasi dan kesiapan KPM untuk graduasi mandiri (Suharto, 2013).

Pendampingan yang partisipatif dan dialogis cenderung mendorong perubahan mindset KPM, sedangkan pendampingan yang bersifat administratif berpotensi melemahkan tujuan pemberdayaan (Ife & Tesoriero, 2008).

4. Modal Sosial sebagai Faktor Penguat Pemberdayaan KPM

Modal sosial dipahami sebagai jaringan kepercayaan, norma, dan relasi sosial yang memungkinkan individu atau kelompok bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama (Putnam, 1993; Coleman, 1988). Dalam konteks P2K2, modal sosial menjadi faktor penguat yang menentukan keberlanjutan proses pemberdayaan KPM.

Teori modal sosial digunakan untuk menganalisis bagaimana hubungan antara KPM dengan pendamping, solidaritas antaranggota kelompok, serta dukungan keluarga memengaruhi proses perubahan perilaku. Kepercayaan yang terbangun dalam forum P2K2 memungkinkan KPM lebih terbuka dalam membahas persoalan ekonomi dan ketergantungan bantuan (Putnam, 2000).

Modal sosial juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong konsistensi KPM dalam menjalankan nilai-nilai kemandirian. Tanpa modal sosial yang kuat, proses P2K2 cenderung bersifat formal dan kurang berdampak pada perubahan nyata (Coleman, 1988).

5. Teori Ketergantungan dan Perubahan Mindset KPM

Kemiskinan tidak hanya bersifat material, tetapi juga kultural dan psikologis. Salah satu implikasi dari program bantuan sosial jangka panjang adalah munculnya ketergantungan penerima manfaat terhadap bantuan negara (Chambers, 1997; Suharto, 2013).

Teori ketergantungan digunakan untuk membaca temuan lapangan terkait sikap KPM yang masih bergantung pada bantuan PKH, serta resistensi terhadap graduasi mandiri. Dalam konteks ini, P2K2 berperan sebagai instrumen untuk membangun kesadaran kritis KPM terhadap posisi sosialnya dan mendorong perubahan mindset dari penerima bantuan menjadi aktor ekonomi yang mandiri (Freire, 1970).

Perubahan mindset menjadi indikator penting dalam analisis kualitatif, karena graduasi mandiri tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi oleh keberanian KPM untuk melepaskan ketergantungan dan mengelola kehidupan ekonomi secara mandiri (Suharto, 2013).

6. Graduasi Mandiri sebagai Output Pemberdayaan

Graduasi mandiri dipahami sebagai hasil akhir dari proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori pemberdayaan, graduasi mandiri tidak dimaknai sebagai sekadar keluarnya KPM dari kepesertaan PKH, tetapi sebagai indikator perubahan kapasitas, kesadaran, dan kemandirian keluarga.

Teori pemberdayaan, modal sosial, dan ketergantungan digunakan secara integratif untuk menganalisis mengapa hanya sebagian kecil KPM yang mampu mencapai graduasi mandiri. Analisis ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor pendukung dan penghambat graduasi mandiri, baik yang bersifat struktural maupun personal.

7. Sintesis Teoretis untuk Analisis Temuan Kualitatif

Graduasi mandiri dipahami sebagai hasil akhir dari proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif teori pemberdayaan, graduasi mandiri tidak dimaknai semata-mata sebagai keluarnya KPM dari kepesertaan PKH, tetapi sebagai indikator perubahan kapasitas, kesadaran, dan kemandirian keluarga (Kementerian Sosial RI, 2021; Mardikanto, 2014).

Teori pemberdayaan, modal sosial, dan ketergantungan digunakan secara integratif untuk menganalisis mengapa hanya sebagian kecil KPM yang mampu mencapai graduasi mandiri. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor pendukung dan penghambat graduasi mandiri, baik yang bersifat struktural maupun personal (Suharto, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis peran Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai instrumen pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mencapai graduasi mandiri. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses pemberdayaan, pengalaman subjektif, serta dinamika sosial yang dialami KPM dalam konteks lokal yang spesifik (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada periode Januari-Maret 2025. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kontekstual, yaitu tingginya jumlah KPM PKH di wilayah tersebut, namun dengan tingkat

graduasi mandiri yang relatif rendah, sehingga relevan untuk dikaji secara mendalam melalui pendekatan studi kasus (Yin, 2018).

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan melibatkan pendamping PKH, KPM PKH aktif, serta KPM yang telah mencapai graduasi mandiri. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informan yang dianggap paling memahami dan mengalami langsung proses P2K2 serta dinamika pemberdayaan dalam Program PKH (Sugiyono, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen program, modul P2K2, serta data pendukung lainnya. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam serta memperkuat validitas temuan penelitian (Creswell & Poth, 2018).

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran P2K2 dalam mendorong pemberdayaan dan kemandirian KPM PKH (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Implementasi P2K2 sebagai Instrumen Pemberdayaan KPM PKH

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan instrumen utama dalam proses pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Duri Kepa. P2K2 dilaksanakan secara berkala oleh pendamping PKH melalui pertemuan kelompok yang bersifat partisipatif dan edukatif, sebagaimana diarahkan dalam pedoman pelaksanaan PKH (Kementerian Sosial RI, 2021). Materi yang diberikan mencakup pengelolaan keuangan keluarga, pola asuh anak, kesehatan keluarga, serta penguatan motivasi dan kemandirian ekonomi, yang sejalan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis peningkatan kapasitas keluarga (Mardikanto, 2014).

Dalam praktiknya, P2K2 tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang refleksi sosial bagi KPM untuk memahami posisi sosial-ekonomi mereka. Temuan ini selaras dengan pandangan bahwa proses pemberdayaan berlangsung melalui interaksi, dialog, dan refleksi kritis terhadap kondisi ketergantungan Freire, (1970) dalam Iff & Tesoriero, (2008). KPM yang aktif mengikuti P2K2 menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perencanaan keuangan, pemanfaatan bantuan secara produktif, serta upaya mencari sumber pendapatan alternatif, yang merupakan indikator awal perubahan kapasitas ekonomi keluarga (Suharto, 2013).

Perubahan Kapasitas KPM Menuju Graduasi Mandiri

Temuan penelitian memperlihatkan adanya perubahan kapasitas pada sebagian KPM, khususnya mereka yang berhasil mencapai graduasi mandiri. Perubahan tersebut terlihat pada tiga aspek utama, yaitu peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku ekonomi. Ketiga aspek ini merupakan dimensi penting dalam proses pemberdayaan, di mana perubahan kognitif dan sikap menjadi prasyarat bagi transformasi perilaku ekonomi (Mardikanto, 2014; Suharto, 2013).

KPM yang telah mencapai graduasi mandiri menunjukkan kemampuan mengelola keuangan rumah tangga secara lebih disiplin, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial, serta memiliki inisiatif untuk mengembangkan usaha kecil atau pekerjaan informal yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan pergeseran posisi KPM dari penerima bantuan pasif menjadi aktor ekonomi yang lebih mandiri, sebagaimana dijelaskan dalam teori pemberdayaan masyarakat (Ife & Tesoriero, 2008).

Selain itu, KPM yang berhasil graduasi mandiri memiliki kesadaran bahwa PKH bersifat sementara dan berfungsi sebagai jembatan menuju kemandirian, bukan sebagai sumber penghidupan utama. Kesadaran ini terbentuk melalui proses pendampingan intensif dan internalisasi nilai-nilai kemandirian yang disampaikan dalam P2K2, yang memperkuat perubahan mindset KPM terhadap bantuan sosial (Freire, 1970; Kementerian Sosial RI, 2021).

Faktor Pendukung dan Penghambat Graduasi Mandiri

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor pendukung pencapaian graduasi mandiri, antara lain motivasi internal KPM, dukungan pendamping PKH, serta konsistensi pelaksanaan P2K2. Motivasi internal berupa keinginan untuk mandiri dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan keluarga menjadi faktor kunci keberhasilan, sebagaimana ditegaskan dalam teori pemberdayaan yang menempatkan kesadaran dan kemauan individu sebagai elemen sentral perubahan (Chambers, 1997; Suharto, 2013).

Dukungan pendamping PKH yang bersifat partisipatif dan dialogis turut memperkuat proses pemberdayaan, karena pendamping berperan sebagai fasilitator perubahan sosial yang menjembatani kebijakan program dengan realitas kehidupan KPM (Ife & Tesoriero, 2008; Kementerian Sosial RI, 2021).

Sebaliknya, faktor penghambat graduasi mandiri meliputi ketergantungan terhadap bantuan sosial, rendahnya kemampuan manajemen keuangan, serta keterbatasan keterampilan ekonomi produktif. Ketergantungan ini mencerminkan dimensi psikologis kemiskinan yang dapat melemahkan inisiatif dan keberanian KPM untuk keluar dari program bantuan Chambers, (1997) dalam Suharto, (2013). Selain itu, besarnya jumlah KPM di Kelurahan Duri Kepa berdampak pada keterbatasan intensitas pendampingan, sehingga tidak seluruh KPM memperoleh pembinaan secara optimal, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas proses pemberdayaan.

PEMBAHASAN

P2K2 sebagai Proses Pemberdayaan KPM

Temuan penelitian menegaskan bahwa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) berperan sebagai proses pemberdayaan yang mencakup aspek input, proses, dan output. Pada aspek input, P2K2 menyediakan pengetahuan, nilai, dan motivasi bagi KPM melalui materi dan interaksi pendampingan. Pada aspek proses, pendampingan dilakukan secara dialogis dan partisipatif, sehingga KPM tidak hanya diposisikan sebagai objek program, tetapi sebagai subjek perubahan sosial. Sementara itu, pada aspek output, P2K2 berkontribusi terhadap terbentuknya perubahan perilaku dan kesiapan KPM menuju graduasi mandiri. Pola ini sejalan dengan pendekatan analisis pemberdayaan yang menekankan perubahan bertahap dari kapasitas individu menuju transformasi perilaku (Mardikanto, 2014; Suharto, 2013).

Hal tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan peningkatan kapasitas individu dan keluarga untuk mengelola sumber daya serta mengambil keputusan secara mandiri. Dalam konteks ini, P2K2 berfungsi sebagai media strategis untuk mentransformasikan bantuan sosial dari pendekatan karitatif menuju pendekatan

pembangunan manusia yang berorientasi pada penguatan kapasitas dan kemandirian Chambers, (1997) dalam Ife & Tesoriero, (2008). Dengan demikian, P2K2 tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sosial yang mendorong perubahan struktur relasi antara negara dan penerima manfaat.

Graduasi Mandiri sebagai Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Graduasi mandiri dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tidak semata-mata diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari perubahan pola pikir dan tingkat kemandirian sosial-ekonomi KPM. Perspektif ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang memandang kesejahteraan sebagai hasil dari perubahan kapasitas dan kontrol individu atas kehidupannya Suharto, (2013) dalam Mardikanto, (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah KPM yang berhasil mencapai graduasi mandiri di Kelurahan Duri Kepa masih sangat terbatas, meskipun jumlah penerima PKH tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan graduasi mandiri sangat bergantung pada kualitas proses pemberdayaan, bukan semata-mata pada besaran bantuan yang diterima (Chambers, 1997).

P2K2 terbukti mampu membangun kesadaran kritis KPM terhadap kondisi sosial-ekonominya melalui proses refleksi dan dialog. Namun, efektivitas P2K2 sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu KPM, motivasi internal, serta keberlanjutan pendampingan yang diterima. Hal ini memperkuat pandangan bahwa graduasi mandiri merupakan hasil dari proses pemberdayaan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, bukan hasil instan dari intervensi program bantuan sosial (Freire, 1970; Ife & Tesoriero, 2008).

Implikasi Pemberdayaan P2K2 terhadap Kebijakan PKH

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa P2K2 memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis dalam mendorong pencapaian graduasi mandiri KPM PKH. Namun, optimalisasi peran P2K2 memerlukan penguatan pada aspek pendampingan yang lebih intensif, pengembangan keterampilan ekonomi produktif, serta penajaman materi yang secara eksplisit berorientasi pada kemandirian ekonomi. Temuan ini sejalan dengan kebijakan PKH yang menempatkan P2K2 sebagai instrumen utama perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas keluarga miskin (Kementerian Sosial RI, 2021).

Dengan demikian, P2K2 tidak semata-mata diposisikan sebagai kewajiban administratif dalam pelaksanaan PKH, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu mengubah pola ketergantungan menjadi kemandirian. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pemberdayaan melalui P2K2 merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan akhir PKH, yaitu menciptakan keluarga yang mandiri dan sejahtera melalui proses pembangunan manusia yang berkelanjutan (Suharto, 2013; Mardikanto, 2014).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menuju graduasi mandiri. P2K2 tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sosial dan refleksi kritis yang mendorong perubahan kapasitas, sikap, dan perilaku KPM dalam mengelola kehidupan sosial-ekonomi keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2K2 mampu menghasilkan perubahan pada sebagian KPM, terutama dalam peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan, kesadaran

akan pentingnya kemandirian, serta munculnya inisiatif ekonomi produktif. KPM yang berhasil mencapai graduasi mandiri umumnya memiliki motivasi internal yang kuat, mampu memaknai PKH sebagai bantuan sementara, serta memperoleh pendampingan yang intensif dan partisipatif dari pendamping PKH.

Namun demikian, efektivitas P2K2 dalam mendorong graduasi mandiri masih menghadapi berbagai keterbatasan. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan sosial, rendahnya keterampilan ekonomi produktif, serta keterbatasan intensitas pendampingan akibat besarnya jumlah KPM menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini menjelaskan mengapa capaian graduasi mandiri di Kelurahan Duri Kepa masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah KPM yang ada.

Dengan demikian, graduasi mandiri tidak dapat dipahami sebagai hasil instan dari pelaksanaan P2K2, melainkan sebagai outcome dari proses pemberdayaan jangka panjang yang memerlukan perubahan mindset, penguatan kapasitas ekonomi, serta dukungan pendampingan yang berkelanjutan. P2K2 berpotensi besar menjadi instrumen transformasi sosial dalam PKH, namun membutuhkan penguatan desain dan implementasi agar tujuan kemandirian KPM dapat tercapai secara lebih optimal.

Saran

1. Bagi Kementerian Sosial dan Pengelola PKH

Perlu dilakukan penguatan desain P2K2 dengan penekanan yang lebih tajam pada pengembangan keterampilan ekonomi produktif dan kesiapan graduasi mandiri, sehingga P2K2 tidak hanya berorientasi pada perubahan pengetahuan, tetapi juga pada kemandirian ekonomi nyata.

2. Bagi Pendamping PKH

Pendamping diharapkan dapat meningkatkan pendekatan pendampingan yang lebih partisipatif, dialogis, dan kontekstual, serta melakukan pendampingan yang lebih intensif kepada KPM yang menunjukkan potensi untuk graduasi mandiri.

3. Bagi KPM PKH

KPM perlu didorong untuk memaknai PKH sebagai bantuan sementara dan memanfaatkan P2K2 sebagai sarana pembelajaran aktif untuk membangun kemandirian dan keberanian melepaskan ketergantungan bantuan sosial.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam penyediaan akses pelatihan keterampilan, permodalan usaha mikro, dan peluang ekonomi lokal bagi KPM PKH.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas P2K2 secara komparatif di wilayah perkotaan dan perdesaan, serta menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor penentu keberhasilan graduasi mandiri.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>

Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?* Environment and Urbanization, 7(1), 173-204. <https://doi.org/10.1177/095624789500700106>

- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Chambers, R. (2006). *Poverty unperceived: Traps, biases and agenda*. Institute of Development Studies.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
<https://doi.org/10.1086/228943>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Data PKH Kelurahan Duri Kepa. (2024). *Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Kelurahan Duri Kepa Tahun 2024*. Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
(Sumber data internal/dokumen resmi)
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalization* (3rd ed.). Pearson Education.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial RI.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2010). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Alfabeta.
- Sulastri, E., & Wibowo, H. (2020). Pemberdayaan keluarga penerima manfaat melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 21(2), 145-160.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- World Bank. (2018). *The state of social safety nets 2018*. World Bank Publications.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1254-5>



Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.